

KOMUNIKASI PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENUNJANG EFISIENSI PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT: KASUS DI KELURAHAN SUMBER SARI, KOTA TANJUNGBALAI

Tetty Herawati¹, Ribut Priadi²

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email Korespondensi: tetyperawat345@gmail.com

Email: ributpriadi@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of village government communication in supporting the efficiency of public administration services in Sumber Sari Village, Tanjungbalai City. Good communication between the village government and the community is a key factor in improving the quality of fast, precise, and effective administrative services. This study uses a qualitative approach with a case study method to explore in-depth information about communication practices implemented in Sumber Sari Village and their impact on the efficiency of administrative services. The results of the study indicate that transparent, accurate, responsive, and technology-based communication is very important to improve the efficiency of administrative services at the village level. The preparation of a more inclusive communication strategy can accelerate the process of administrative services, reduce administrative errors, and increase public satisfaction.

Keywords: Government communication, Administrative services, Efficiency, Villages.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi pemerintah kelurahan dalam menunjang efisiensi pelayanan administrasi masyarakat di Kelurahan Sumber Sari, Kota Tanjungbalai. Komunikasi yang baik antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali informasi secara mendalam tentang praktek komunikasi yang diterapkan di Kelurahan Sumber Sari dan dampaknya terhadap efisiensi pelayanan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang transparan, akurat, responsif, dan berbasis teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi di tingkat kelurahan. Penyusunan strategi komunikasi yang lebih inklusif dapat mempercepat proses pelayanan administrasi, mengurangi kesalahan administrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kata Kunci : Komunikasi Pemerintah, Pelayanan Administrasi, Efisiensi, Kelurahan.

PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi publik di tingkat kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kelurahan, sebagai unit administratif terendah dalam struktur pemerintahan, berfungsi sebagai penghubung langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah kelurahan sangat menentukan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara keseluruhan. Pelayanan administrasi ini mencakup berbagai layanan seperti pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, surat keterangan domisili, dan berbagai administrasi kependudukan lainnya. Pelayanan ini tidak hanya penting bagi masyarakat secara individu, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Namun, masalah yang sering muncul dalam pelayanan administrasi di kelurahan adalah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

ketidakefisienan proses administrasi, baik dari sisi waktu, biaya, maupun kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Salah satu penyebab utama dari ketidakefisienan ini adalah komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang prosedur yang harus dilakukan, kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlukan, serta ketidakjelasan mengenai waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam setiap proses administrasi. Pentingnya pola komunikasi di lingkup pemerintahan akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi pula. Terdapat dua jenis komunikasi organisasi, yakni komunikasi secara internal (dalam organisasi) maupun komunikasi eksternal (diluar). Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau komunikasi secara langsung dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila komunikasi secara langsung tidak dapat dimengerti oleh keduanya maka komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi atau disebut sebagai komunikasi secara tidak langsung. (Jannaturrahman,2022).

Nakpodia (2010) dalam Yosol Iriantara & Usep Syaripudin 2 (2013: 41) kemudian mengemukakan bahwa tanpa adanya komunikasi, suatu organisasi tidak akan sesuai dengan harapan jika tidak memiliki dan arah komunikasi yang terstruktur. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat kita ketahui seberapa pentingnya pelaksanaan komunikasi di dalam suatu organisasi sebagai ujung tombak dalam keberhasilan organisasi pemerintahan. Temuan di Kelurahan Sumber Sari, Kota Tanjungbalai, masalah ini semakin terasa karena adanya diversitas karakteristik masyarakat yang cukup besar, termasuk perbedaan dalam akses terhadap teknologi, tingkat pendidikan, dan pemahaman mengenai prosedur administrasi. Banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam memahami berbagai proses administratif yang dilakukan di kelurahan, terutama dalam situasi di mana prosedur tersebut memerlukan pengisian formulir yang cukup rumit atau pengumpulan dokumen yang memerlukan pemahaman mendalam. Di sisi lain, meskipun informasi tentang pelayanan sudah disebarkan melalui berbagai saluran, ada bagian dari masyarakat yang belum sepenuhnya memanfaatkan informasi yang tersedia, baik karena keterbatasan akses terhadap media informasi maupun ketidakpahaman mengenai penggunaan teknologi.

Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi adalah komunikasi. Komunikasi pemerintah di sini bukan hanya sekadar penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah kelurahan dapat mendengarkan masukan dari masyarakat, menanggapi keluhan, dan menyediakan jalur yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Komunikasi yang efektif akan memudahkan masyarakat dalam memahami prosedur yang berlaku dan mengurangi potensi terjadinya kesalahan administratif yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat mengenai apa yang perlu dilakukan. Namun, tantangan terbesar dalam komunikasi pemerintah kelurahan di Sumber Sari adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dalam mempercepat dan mempermudah proses komunikasi dengan masyarakat. Meskipun beberapa inisiatif sudah dilakukan, seperti pengumuman melalui media sosial dan grup WhatsApp, masih terdapat gap komunikasi antara pemerintah dan sebagian besar warga yang tidak memiliki akses internet atau kesulitan dalam menggunakan teknologi tersebut. Hal ini menyebabkan kesenjangan informasi yang dapat berujung pada ketidaktepatan pengurusan administrasi atau bahkan keterlambatan dalam pengurusan layanan

Selain itu, kurangnya pelatihan untuk aparat kelurahan dalam hal komunikasi publik yang efektif juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk kualitas pelayanan. Banyak petugas di kelurahan yang masih belum terlatih untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara jelas dan ramah, yang pada akhirnya memperburuk persepsi masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Kesalahpahaman sering kali terjadi karena kurangnya keterampilan dalam menyampaikan informasi secara langsung, baik secara verbal maupun tertulis. Tidak hanya itu, masalah birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya transparansi dalam prosedur administrasi juga menjadi tantangan dalam menciptakan pelayanan yang efisien dan memadai. Proses administrasi yang panjang dan rumit sering kali membuat masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diterima. Komunikasi yang buruk dalam hal prosedur administratif menyebabkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

masyarakat merasa kebingungan, bahkan cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem pelayanan publik yang ada. Tulisan ini akan menjawab bagaimana komunikasi pemerintah kelurahan dalam menunjang efisiensi pelayanan administrasi masyarakat: kasus di kelurahan sumber sari, kota tanjungbalai?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk menggali lebih dalam dinamika yang terjadi di lapangan terkait komunikasi dan pelayanan administrasi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2014:1). Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pejabat kelurahan, staf administrasi, serta warga yang menggunakan layanan administrasi. Selain itu, observasi langsung dilakukan pada proses pelayanan administrasi di Kelurahan Sumber Sari, terutama yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola utama dalam praktik komunikasi dan efisiensi pelayanan administrasi berdasarkan data yang terkumpul.

PEMBAHASAN

Komunikasi dalam organisasi pemerintahan tentunya memiliki hubungan dengan satu atau lebih elemen dalam struktur organisasi. Komunikasi yang terjadi di luar organisasi melibatkan pertukaran informasi atau arus data yang masuk dari luar ke dalam organisasi. Setiap tahap dalam manajemen organisasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sumber Sari menunjukkan bahwa semua elemen atau aparatur kelurahan saling terhubung, sesuai dengan teori organisasi yang menjelaskan bahwa organisasi dapat menunjukkan ciri-cirinya. Hal ini juga didukung oleh pendapat Wiryanto (2005) yang menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam kelompok, baik itu secara formal maupun informal. Organisasi dipahami sebagai sekelompok individu yang saling berkomunikasi dan memberi makna satu sama lain. Dengan demikian, pembentukan organisasi yang baik menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan administrasi tentunya memerlukan aparatur pemerintah sebagai penggerak utama dalam pengembangan dan pelayanan komunikasi organisasi. Tanpa adanya peran dari Aparatur Sipil Negara (ASN), proses komunikasi organisasi tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa komunikasi yang efektif akan menciptakan sistem pelayanan administrasi yang lebih baik. Di Kelurahan Sumber Sari, pemerintah kelurahan telah menerapkan beberapa saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan administrasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa praktik komunikasi yang dilakukan pemerintah kelurahan mencakup saluran komunikasi formal dan informal, baik berbasis teknologi maupun komunikasi langsung.

Saluran Komunikasi Formal

Saluran komunikasi formal yang digunakan oleh Kelurahan Sumber Sari antara lain papan pengumuman yang diletakkan di lokasi strategis di kelurahan dan media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp Group resmi yang dikelola oleh kelurahan. Papan pengumuman ini mencakup informasi terkait jadwal pelayanan, prosedur pengurusan administrasi, dan pengumuman penting lainnya. Di sisi lain, WhatsApp Group menjadi saluran yang cukup efektif karena memberikan kemampuan bagi pemerintah kelurahan untuk melakukan komunikasi langsung dan dua arah dengan masyarakat.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Masyarakat dapat dengan mudah menanyakan informasi atau mengajukan pertanyaan mengenai prosedur administrasi.

Namun, meskipun saluran komunikasi ini cukup efektif, beberapa tantangan muncul, terutama terkait aksesibilitas informasi. Papan pengumuman, meskipun berguna, hanya dapat diakses oleh masyarakat yang datang ke kantor kelurahan, sehingga tidak bisa menjangkau warga yang tidak sering berkunjung ke kelurahan. Selain itu, meskipun WhatsApp Group memudahkan komunikasi, banyak masyarakat yang tidak memiliki akses internet atau tidak terbiasa menggunakan teknologi ini. Hal ini menyebabkan sebagian warga tidak memperoleh informasi yang diperlukan, dan berpotensi menghambat kelancaran pelayanan.

Saluran Komunikasi Informal

Selain saluran komunikasi formal, saluran komunikasi informal melalui kepala lingkungan (RT/RW) juga memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi. Kepala lingkungan menjadi perantara yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat di tingkat mikro. Dalam banyak kasus, kepala lingkungan sering kali mengadakan pertemuan dengan warga untuk memberikan informasi terkait pelayanan administrasi, serta mendengarkan keluhan atau permasalahan yang dihadapi warga. Proses komunikasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh klarifikasi secara langsung.

Namun, tantangan yang dihadapi di sini adalah ketergantungan pada kemampuan pribadi kepala lingkungan dalam menyampaikan informasi. Tidak semua kepala lingkungan memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau mampu menjelaskan prosedur administrasi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini terkadang menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman, terutama pada warga yang kurang terbiasa dengan prosedur administrasi.

Pengaruh Komunikasi terhadap Efisiensi Pelayanan Administrasi

Efisiensi pelayanan administrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah kelurahan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa komunikasi yang jelas, transparan, dan akurat memiliki dampak signifikan terhadap kecepatan dan ketepatan proses administrasi. Misalnya, pengumuman yang jelas mengenai jam operasional, persyaratan dokumen, dan prosedur pengurusan administrasi membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum datang ke kelurahan. Hal ini mengurangi waktu tunggu yang diperlukan dan mengurangi risiko kesalahan administratif. Kecepatan proses administrasi juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi dalam komunikasi. Penggunaan WhatsApp Group dan aplikasi online seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan administrasi tanpa harus datang langsung ke kelurahan. Hal ini memungkinkan warga untuk melakukan beberapa tahap administrasi dari rumah, yang pada gilirannya mengurangi beban fisik pada kantor kelurahan dan mengurangi antrean panjang.

Namun, meskipun penerapan teknologi sudah memberikan dampak positif dalam hal efisiensi, ada kendala terkait penerimaan masyarakat. Beberapa warga, terutama yang berusia lanjut atau tidak terbiasa dengan teknologi, merasa kesulitan untuk mengakses layanan online atau mengoperasikan perangkat yang diperlukan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, ada kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem ini. Selain itu, meskipun beberapa prosedur administrasi bisa diselesaikan secara daring, beberapa layanan tetap membutuhkan interaksi langsung, seperti verifikasi dokumen atau pengambilan kartu identitas. Keterbatasan kapasitas ruang pelayanan di kelurahan juga menjadi hambatan, di mana banyaknya warga yang datang dengan berbagai tujuan administrasi dapat menyebabkan penumpukan dan menghambat kelancaran pelayanan. Oleh karena itu, meskipun komunikasi berbasis teknologi memberikan dampak positif, tidak semua jenis pelayanan bisa diselesaikan secara efektif tanpa interaksi tatap muka.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Tantangan dalam Menerapkan Komunikasi yang Efektif

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah kelurahan dalam menerapkan komunikasi yang efektif untuk menunjang efisiensi pelayanan administrasi adalah kesenjangan digital. Sejumlah besar masyarakat Kelurahan Sumber Sari tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menyebabkan sebagian warga kesulitan mendapatkan informasi terbaru tentang prosedur administrasi atau tidak bisa memanfaatkan aplikasi yang disediakan. Meskipun media sosial seperti WhatsApp dapat menjadi solusi untuk sebagian besar warga, beberapa kelompok masyarakat, terutama yang lebih tua atau mereka yang tinggal di daerah yang kurang terjangkau jaringan internet, tetap merasa terabaikan.

Selain itu, kurangnya kapasitas komunikasi aparat kelurahan juga menjadi tantangan. Meskipun ada upaya untuk menyampaikan informasi melalui kepala lingkungan atau saluran komunikasi lain, tidak semua petugas kelurahan dilatih untuk menyampaikan informasi dengan cara yang efektif dan ramah. Beberapa masyarakat melaporkan bahwa mereka merasa kebingungan atau frustrasi karena prosedur yang dijelaskan terlalu teknis atau tidak disampaikan dengan cara yang mudah dipahami.

Tantangan lain yang ditemukan adalah kurangnya transparansi dalam beberapa proses administrasi. Meskipun sudah ada upaya untuk memberikan informasi terkait prosedur dan persyaratan administrasi, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa sistem birokrasi di kelurahan terlalu rumit dan tidak transparan. Ini menjadi masalah besar, karena ketidakjelasan informasi mengenai biaya, waktu, atau persyaratan dapat menghambat efisiensi dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Rekomendasi untuk Peningkatan Komunikasi dan Efisiensi Pelayanan

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan komunikasi pemerintah kelurahan dan efisiensi pelayanan administrasi adalah:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Untuk mengurangi kesenjangan digital, pemerintah kelurahan harus memastikan bahwa semua warga dapat mengakses informasi tentang pelayanan administrasi, baik melalui perangkat yang lebih sederhana atau dengan menyediakan titik akses internet di lokasi strategis (misalnya di balai desa atau kantor kelurahan).
2. Pelatihan Aparatur Kelurahan dalam Komunikasi Efektif: Aparatur kelurahan perlu dilatih secara berkelanjutan untuk dapat mengkomunikasikan informasi dengan cara yang lebih jelas dan ramah. Pelatihan komunikasi juga harus mencakup keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
3. Penyederhanaan Prosedur Administrasi: Proses administratif yang rumit dan panjang dapat dihindari dengan melakukan penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi terkait biaya, waktu, dan persyaratan yang diperlukan. Hal ini akan meminimalkan kebingungan di kalangan masyarakat dan mempercepat proses pelayanan.
4. Sistem Umpan Balik Masyarakat: Pengembangan sistem pengaduan atau umpan balik yang lebih efisien dan transparan dapat membantu pemerintah kelurahan untuk mendengarkan langsung masukan dan keluhan masyarakat, serta memberikan solusi yang lebih cepat dan tepat.

KESIMPULAN

Komunikasi yang efektif antara pemerintah kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Sumber Sari terbukti dapat meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi. Penerapan teknologi informasi yang transparan, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat menjadi faktor utama dalam mempercepat proses administrasi. Namun, tantangan berupa kesenjangan digital dan keterbatasan sumber daya manusia masih harus diatasi untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan administrasi yang efisien dan berkualitas. Strategi komunikasi yang inklusif dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

berbasis teknologi harus terus diperbaiki untuk menunjang efisiensi pelayanan publik di tingkat kelurahan.

REFERENSI

- Arni, Muhammad. 2014. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Alo, Liliweri. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenana Media Group.
- Arifuddin Tike. (2009). *Dasar-dasar komunikasi suatu studi dan aplikasi*, (cet. I; yogyakarta: kota kembang.
- Alimuddin, Usman, Mashur Rasak dan Syamsul Alam. (2020). *Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan*. JMMNI Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia. Volume 1 Nomor 2. Hal. 209-218
- Arifin Anwar. (1992). *Strategi Komunikasi*. Armico, Bandung
- A, Pasuraman. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Edisi Revisi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Badri, M Sukoco. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta : Erlangga
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J, (1966). *Role Theory : Concept and Research*. NewYork : Wiley.
- Bogdan dan Taylor. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya, Bandung.
- Grunig, J., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. Holt, Rinehart & Winston.
- Harrison, G. W., & Yoon, H. (2016). *Technology and Public Service Efficiency*. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Jannaturrahman. (2022). *Peran Komunikasi Aparatur Dalam Pelayanan Pada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo*.
- Moleong, LexyJ.(2009).*Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya:Bandung
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Rathmell, A. M. (1983). *Public Administration and Service Efficiency*. Public Administration Review. UUD Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Yosal Iriantara & Usep Syaripudin. (2013). *Komunikasi Pendidikan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Westley, B. H., & MacLean, M. S. (1957). *A Conceptual Model for Communication in Public Administration*. Public Administration Review.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id